

EFEKTIVITAS PROGRAM KALIMASADA DISPENDUKCAPIL KOTA (Studi Kasus Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo)

Nur Rahmawati, Esa Wahyu Endarti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

nurrachma2206@gmail.com¹, esawahyuendarti@uwp.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi kependudukan) oleh Dispendukcapil Kota Surabaya di Kecamatan Pakal dan Benowo; (2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) oleh Dispendukcapil Kota Surabaya di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas program dari Surisno (2007: 125 – 126) yang didalamnya terdapat lima dimensi yakni, (1) Pemahaman Terkait Program; (2) Tepat Sasaran; (3) Tepat Waktu; (4) Tercapainya Tujuan; (5) Perubahan Nyata. Lokasi penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kalimasada yang ada di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo ini sudah efektif, meskipun terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Kalimasada, Admnistrasi Kependudukan

Abstract

This study aims to (1) To find out and describe the effectiveness of the Kalimasada program (Awareness Community Administration Population Area) by the Dispendukcapil of Surabaya City in Pakal and Benowo Districts; (2) to find out and describe the factors that influence the implementation of the Kalimasada program (Population Administration Awareness Community Environment Area) by the Surabaya City Population and Civil Registry Office in Pakal and Benowo Districts. Using qualitative research methods, this research was conducted using the theory of measuring program effectiveness from Surisno (2007: 125 – 126) in which there are five dimensions, namely, (1) Program-Related Understanding; (2) Right on Target; (3) On time; (4) Achievement of Goals; (5) Real Change. The location of the research conducted at the Surabaya City Population and Civil Registration Service, Pakal District and Benowo District shows that the implementation of the Kalimasada program in the Pakal District and Benowo District area has been effective, although there are several factors that influence its implementation.

Keywords: Program Effectiveness, Kalimasada Program, Population Administration

Pendahuluan

Manajemen kependudukan (Adminduk) merupakan sekumpulan fungsi untuk menyusun serta mengelola dokumen dan informasi kependudukan untuk pengembangan daftar kependudukan serta pengelolaan data kependudukan dan pemandaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya. (Indonesia, 2019). Sebagai mana suatu sistem manajemen kependudukan, karena kependudukan diharapkan mampu melaksanakan hak administratif kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui peran aktif penduduk dan mendapatkan perlindungan sehubungan dengan pengeluaran dokumen kependudukan tanpa adanya diskriminatif dari pemerintah daerah. Sehubungan dengan agar terpenuhinya *database* kependudukan maka diperlukannya penerapan sanksi administratif bagi penduduk agar tidak adanya diskriminatif sesama penduduk baik penduduk warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan harapan terciptanya pengelolaan data kependudukan yang teroganisir, serta menghilangkan diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan penertiban dokumen kependudukan, dan memudahkan promosi iklim investasi di Indonesia.

Tentunya dalam pelaksanaan pelayanan Adminduk diperlukannya adanya inovasi sehingga diharapkannya pelayanan Adminduk membuat masyarakat lebih mudah dalam pengurusannya. Hal ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 yang mana merupakan undang – undang perubahan dari UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dibuatnya suatu sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pengurusan yang dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) antara lain yakni, pencatatan biodata penduduk, penerbitan kartu keluarga (KK), penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), penerbitan kartu identitas anak (KIA), penerbitan surat keterangan kependudukan, pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, dan pendataan penduduk non-permanen (Walikota Surabaya, 2019). Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) merupakan salah satu program sensus kependudukan Kota Surabaya yang menginisiasi terciptanya lingkungan/desa Adminduk yang tertata dengan meningkatkan jumlah masyarakat sadar Adminduk. Program tersebut dilaksanakan dengan melantik 62 pengurus RT di setiap Kelurahan Kota Surabaya dan meluncurkan layanan Adminduk di sekitar Rukun Tetangga agar layanan Adminduk lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang ada dan menjadi latar belakang munculnya program ini adalah masih dianggapnya kepengurusan administrasi kependudukan oleh masyarakat bukan suatu hal yang penting. Seperti kepemilikan kartu keluarga ber-*barcode* yang

masih dirasa oleh sebagian warga bukan termasuk hal penting karena mereka merasa bahwa dalam mengurus dokumen tersebut sangat sulit dan ribet maka banyak dari mereka yang merasa tidak perlu membuat KK cukup dengan orang lain tau bahwa itu adalah keluarga mereka.

Contoh lainnya yakni kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak). Tujuan dibuatkannya KIA (Kartu Identitas Anak) adalah untuk memberikan perlindungan konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat di antara lain; (1) melindungi pemenuhan atas hak-hak anak, (2) menjamin akses sarana umum untuk anak, (3) sebagai bukti indentifikasi bagi anak apabila mengalami kejadian buruk, (4) untuk mencegah terjadinya perdagangan anak, serta (5) memudahkan anak untuk mendapat akses pelayanan publik. Dapat dilihat bahwa KIA sendiri memiliki banyak manfaat bagi seroang anak, tetapi banyaknya orang tua yang masih menganggap tidak perlunya anak usia 0 – 16 tahun ini memilikinya karena menganggap mengurus KIA memiliki persyaratan yang sulit dan merepotkan.

Dengan dimunculkannya inovasi Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk) ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait persyaratan yang mudah dan tidak merepotkan karena dapat dilakukan oleh RT Rintisan dengan melalui aplikasi KNG (*Klampid New Generation*). Dalam hal pelaksanaan Program Kalimasada yang telah berjalan dari tahun 2021 ini ingin diketahui apakah dalam program ini sudah berjalan dengan efektif khususnya di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo, juga faktor yang memengaruhinya.

Metode

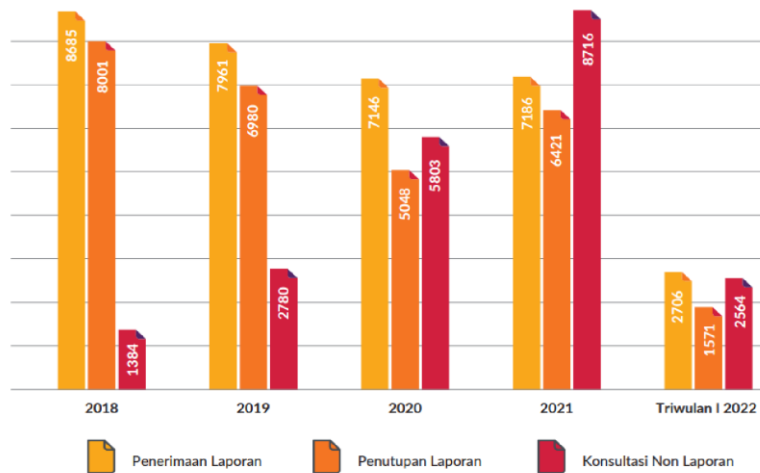
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi tertentu dalam kehidupan nyata (alamiah), yang tujuannya untuk mempelajari dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa fenomena tersebut terjadi dan bagaimana fenomena tersebut terjadi, dengan dilakukannya wawancara serta dokumentasi dalam pengambilan data lapangan. Sedangkan dalam pengukuran efektivitas program digunakannya pengukuran menurut Surisno (2007: 125-126), dengan indikator (1) Pemahaman Terkait Program; (2) Tepat Sasaran; (3) Tepat Waktu; (4) Tercapainya Tujuan; dan (5) Perubahan Nyata. Serta memperhatikan faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan program Kalimasada di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo. Dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan Pakal, dan Kecamatan Benowo. Dalam perolehan keabsahan data dilakukannya dengan mereduksi data, yang dilanjutkan dengan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya membuat sebuah inovasi dalam pelayan administrasi kependudukan dalam rangka menerapkan *good government* di Kota Surabaya dengan diluncurkannya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan nama KNG (*Klampid New Generation*) yang dapat diakses melalui *smartphone* maupun komputer. Hal yang mendasari hal ini adalah adanya maladministrasi yang ada di lingkup pelayanan publik, bahwa substansi laporan paling meningkat yakni sebesar 631 laporan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan (Republik Indonesia, 2022). Administrasi kependudukan merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi karena menyangkut penentuan status kewarganegaraan yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh warga negara. (Harpy et al., 2022).

Gambar 1. Maladministrasi kuartar 1 laporan/pengaduan masyarakat lima tahun terkahir 2018 - triwulan I 2022

Sumber: Ombudsman RI, 2022



Inovasi ini bernama Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) yang telah diluncurkan sejak 18 November 2021 ini memiliki dua tujuan utama yakni mewujudkan tertib lingkungan di Kota Surabaya dengan memperbanyak jumlah masyarakat mengenal pentingnya adminduk sendiri, serta mempermudah akses masyarakat dalam mengurus dokumen adminduk agar tidak terjadinya maladministrasi.

Administrasi kependudukan sendiri menjadi hal yang penting karena hal tersebut merupakan sebuah identitas bagi penduduk yang unik, khas, tunggal dan melekat (Indonesia, 2019) untuk dapat dikenali ataupun diketahui keberadaannya dan sebagai bentuk perlindungan status hak sipil. Selain poin yang telah disampaikan diatas, penting untuk penduduk mengurus administrasi juga adanya kewajiban bagi penduduk dalam

pemenuhan data statistik secara nasional terkait peristiwa penting kependudukan, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal juga mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Dalam kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan ini adalah cukup dilakukannya kepengurusan melalui ranah RT yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini Kecamatan Pakal diketahui telah memiliki RT Rintisan sebanyak 31 RT yang terbagi di beberapa Kelurahan di wilayah Kecamatan Pakal. Begitupula dengan jumlah RT Rintisan di Kecamatan Benowo yang hampir sama dengan jumlah RT yang ada di wilayah Kecamatan Pakal. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program Kalimasada telah berjalan dengan efektif di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo maka digunakannya sebuah pengukuran efektivitas program dari Surisno (2007: 125-126) dengan indikator dimensi dibawah ini:

Pemahaman Terkait Program

Dalam hal ini baik Kecamatan Pakal maupun Kecamatan Benowo sama-sama memiliki bekal yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melalui sosialisasi Program Kalimasada dengan mengundang bakal calon RT dengan tujuan agar bakal calon RT Rintisan ini mengerti dengan benar apa tujuan, visi, misi dari diadakannya program Kalimasada ini.

Tepat Sasaran

Berdasarkan wawancara yang dilakukan sasaran pada program ini adalah seluruh warga di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo. Khususnya yang menjadi sasaran yakni warga yang telah berusia wajib memiliki dokumen administrasi negara atau berusia 17 Tahun, dengan mulai dimilikinya KTP (Kartu Identitas Penduduk).

Tepat Waktu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki harapan agar program ini selamanya terus berjalan. Mengulas kembali pada awal program ini dijalankan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hanya menunjukk 62 RT Rintisan di wilayah Kelurahan dengan minimal dalam 1 Kecamatan memiliki 2 RT Rintisan. Hingga saat ini semakin banyak Kecamatan di Kota Surabaya yang mendaftarkan RT di wilayahnya untuk menjadi RT Rintisan. Di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo sendiri menerapkan timeline dalam 6 bulan terakhir ini, dimulai dari bulan Januari – Juni 2023 ini dalam pelaksanaan program Kalimasada yang menjadi fokus utamanya yakni kepengurusan KK *barcode* dan IKD (Identitas Kependudukan Digital).

Tercapainya Tujuan

Dalam proses tercapainya tujuan dari pelaksanaan program Kalimasada ini, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo telah melakukan banyak upaya untuk

membantu RT Rintisan dalam pelaksanaan program Kalimasada di wilayahnya, meskipun dalam hal ini Kecamatan hanya sebagai perbantuan pengawasan pelaksanaan program yang dijalankan oleh RT saja. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya warga yang telah menyadari pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan.

Table 1. Jumlah Penduduk yang Memiliki KK *barcode* di Kecamatan Pakal

Jumlah Penduduk yang Memiliki KK <i>barcode</i>		L	P	Jumlah
Kecamatan	Pakal	15.960	3.678	19.638
Kelurahan	Pakal	2.919	630	3.549
Kelurahan	Babat Jerawat	6.616	1.595	8.211
Kelurahan	Sumber Rejo	3.320	736	4.056
Kelurahan	Benowo	3.105	717	3.822

Sumber: Data di Kecamatan Pakal

Table 2. Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP di Kecamatan Pakal

Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP		L	P	Jumlah
Kecamatan	Pakal	22.785	22.854	45.639
Kelurahan	Pakal	4.073	4.038	8.111
Kelurahan	Babat Jerawat	9.616	9.882	19.498
Kelurahan	Sumber Rejo	4.724	4.602	9.326
Kelurahan	Benowo	4.372	4.332	8.704

Sumber: Data di Kecamatan Pakal

Table 3. Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KK *barcode* di Kecamatan Benowo

Jumlah Penduduk yang Memiliki KK <i>barcode</i>		L	P	Jumlah
Kecamatan	Benowo	18.682	4.559	23.241
Kelurahan	Kandangan	6.210	1.602	7.812

Jumlah Penduduk yang Memiliki KK <i>barcode</i>		L	P	Jumlah
Kelurahan	Sememi	10.654	2.443	13.097
Kelurahan	Tambak Oso	1.001	314	1.315
	Wilangun			
Kelurahan	Romokalisari	817	200	1.017

Sumber: Data Kecamatan Benwo

Table 4. Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP di Kecamatan Benowo

Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP		L	P	Jumlah
Kecamatan	Benowo	26.107	26.970	53.077
Kelurahan	Kandangan	8.655	9.097	17.752
Kelurahan	Sememi	14.854	15.329	30.183
Kelurahan	Tambak Oso	1.415	1.414	2.829
	Wilangun			
Kelurahan	Romokalisari	1.183	1.130	2.313

Sumber: Data Kecamatan Benowo

Dari tabel diatas jika disandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Pakal yakni sebanyak 60,877 jiwa, dan penduduk di Kecamatan Benowo sebanyak 70,988 jiwa. Maka hal ini membuktikan bahwa kesadaran penduduk di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo telah memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Dampak Nyata

Dampak dari pelaksanaan program Kalimasada ini tentu saja tidak hanya dirasakan oleh warga yang telah memiliki dokumen administrasi kependudukan. Seperti setelah mereka memiliki dokumen administrasi kependudukan mereka telah merasakan berbagai kemudahan dalam mengurus hal lainnya. Tetapi juga para pelaksana seperti bagi

pihak Kecamatan atau Pemerintah yang dalam melakukan intervensi dalam bentuk bantuan semakin mudah karena hal tersebut akan lebih tepat sasaran.

Faktor yang Memengaruhi

Terdapat dua faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan program Kalimasada ini, yang pertama yakni faktor pendukung, dan kedua faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Baik di Kecamatan Pakal maupun Kecamatan Benowo, memiliki RT Rintisan yang sangat bersemangat dalam pelaksanaan program Kalimasada di wilayahnya. Sehingga mereka gencar melakukan sosialisasi kepada warganya akan pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan ini.

2. Faktor Penghambat

Di Kecamatan Pakal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Kalimasada ini adalah kurangnya sosialisasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) karena aplikasi IKD sendiri hanya dapat diakses di beberapa *smartphone* yang ada. Bagi kepemilikan *iphone* sendiri memiliki proses yang sedikit rumit dalam mengurus IKD. Sedangkan di Kecamatan Benowo masih banyak masyarakat yang kurang percaya akan kepengurusan dokumen administrasi kependudukan dilakukan di RTnya, mereka merasa sudah seharusnya mengurus dokumen administrasi kependudukan ini di tingkat Kelurahan ataupun Kecamatan bukan melalui RTnya, dan masih kurang lihai beberapa RT Rintisan dalam penggunaan *smartphone*.

Berikut adalah table perbandingan dalam pelaksanaan program Kalimasada di wilayah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo:

Table 5. Perbandingan Pelaksanaan Program Kalimasada di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo

No	Dimensi	Kecamatan Pakal	Kecamatan Benowo
1.	Pemahaman Terkait Program	Dilakukannya sosialisasi kepada RT Rintisan dan pihak Kecamatan Pakal sebagai perbantuan pengawasan RT Rintisan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dilakukannya sosialisasi kepada RT Rintisan dan pihak Kecamatan Benowo sebagai perbantuan pengawasan RT Rintisan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
2.	Tepat Sasaran	Setelah dilakukannya wawancara dengan RT Rintisan yang ada di wilayah Kecamatan Pakal, yakni Kelurahan Pakal, Raci pelaksanaan program Kalimasada yang ada di sana sudah mencapai 90% khususnya dalam pelaksanaan program pembuatan KK <i>barcode</i> .	Sesuai dengan arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam pelaksanaan program ini Kecamatan Benowo dan RT Rintisan berusaha untuk program ini dapat dilaksanakan di seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayahnya.
3.	Tepat Waktu	Dalam program Kalimasada sendiri tidak terdapat tenggat waktu apapun dalam pelaksanaannya, tetapi dalam 6 bulan kebelakang yakni Januari – Juni 2023 ini timeline yang ada di Kecamatan Pakal fokus utama dalam pelaksanaan program Kalimasada adalah pembaruan KK menjadi KK <i>barcode</i>	Dalam program Kalimasada sendiri tidak terdapat tenggat waktu apapun dalam pelaksanaannya, tetapi dalam 6 bulan kebelakang yakni Januari – Juni 2023 ini timeline yang ada di Kecamatan Benowo fokus utama dalam pelaksanaan program Kalimasada adalah pembaruan KK menjadi KK <i>barcode</i>

No	Dimensi	Kecamatan Pakal	Kecamatan Benowo
		dan IKD (Identitas Kependudukan Digital).	dan IKD (Identitas Kependudukan Digital).
4.	Tercapainya Tujuan	Dalam pelaksanaan program Kalimasada yang ada di Kecamatan Pakal telah tercapai dengan dibuktikannya hampir seluruh masyarakat di wilayahnya telah memiliki dokumen kependudukan Hal ini dilihat dari keseluruhan total warga yang ada di wilayah Kecamatan Pakal sebanyak 60,877 jiwa, sudah banyak dari warga tersebut memiliki dokumen administrasi kependudukan. yakni sebanyak 19.638 jiwa telah memiliki KK <i>barcode</i> dan sebanyak 45.639 jiwa telah memiliki KTP.	Dalam pelaksanaan program Kalimasada yang ada di Kecamatan Benowo telah tercapai dengan dibuktikannya hampir seluruh masyarakat di wilayahnya telah memiliki dokumen kependudukan Hal ini dilihat dari keseluruhan total warga yang ada di wilayah Kecamatan Benowo sebanyak 70.988 jiwa, sudah banyak dari warga tersebut memiliki dokumen administrasi kependudukan. yakni sebanyak 23.241 jiwa telah memiliki KK <i>barcode</i> dan sebanyak 53.077 jiwa telah memiliki KTP.
5.	Dampak Nyata	Dari terlaksananya program Kalimasada ini dampak yang terasa bagi Kecamatan yakni dimudahnya bagi pihak kecamatan melakukan intervensi saat memberikan bantuan bagi pihak masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yakni mudahnya kepengurusan lainnya jika memiliki dokumen administrasi kependudukan.	Dari terlaksananya program Kalimasada ini dampak yang terasa bagi Kecamatan yakni dimudahnya bagi pihak kecamatan melakukan intervensi saat memberikan bantuan bagi pihak masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yakni mudahnya kepengurusan lainnya jika memiliki dokumen administrasi kependudukan.

No	Dimensi	Kecamatan Pakal	Kecamatan Benowo
6.	Faktor Pendukung	semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan tugasnya, baik mensosialisasikan program Kalimasada, juga dalam membantu masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Kedua, banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Pakal yang percaya dengan RT Rintisan dalam mengurus administrasi kependudukan miliknya tanpa perlu jauh-jauh ke Kelurahan maupun Kecamatan	Semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan tugasnya, baik mensosialisasikan program Kalimasada, juga dalam membantu masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan.
7.	Faktor Penghambat	Meskipun sudah banyak masyarakat yang telah memiliki KTP tetapi masih jarang masyarakat wilayah Kecamatan Pakal yang ingin mengurus IKD (Identitas Kependudukan Digital) karena dalam mengurusnya masih harus datang ke Kecamatan Pakal.	Sekalipun semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, tetapi warga dibandingkan mengurus di ranah RT Rintisan masih banyak yang lebih mempercayai kelurahan atau kecamatan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa lebih mudah kepengurusan secara <i>offline</i> karena dalam mengurus administrasi kependudukan terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan

No	Dimensi	Kecamatan Pakal	Kecamatan Benowo
			yang harus ditanyakan, maka masih banyak yang mengurus di Kecamatan Benowo. Selain dikarenakan masyarakat yang masih banyak yang kurang percaya mengurus administrasi kependudukan melalui RT Rintisan, hambatan lainnya adalah keterbatasan RT Rintisan dalam membantu masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan secara <i>online</i> , hal ini dikarenakan kurang canggihnya telepon seluler yang dimiliki oleh RT Rintisan.

Sumber: Diolah Peneliti

Penutup

Pelaksanaan program Kalimasada di Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo secara garis besar sudah berjalan dengan efektif karena semua sudah sesuai dengan indikator yang ada pada teori efektivitas program menurut Surisno (2007: 125-126). Faktor yang memengaruhi program:

- a. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Kalimasada
 - a) Di Kecamatan Pakal:

Semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan program Kalimasada serta masyarakat yang percaya dengan RT Rintisan dalam mengurus administrasi kependudukan miliknya.
 - b) Di Kecamatan Benowo:

Semangatnya RT Rintisan dalam melaksanakan program Kalimasada.
- b. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Program Kalimasada
 - a) Di Kecamatan Pakal:

Meskipun sudah banyak masyarakat yang telah memiliki KTP tetapi masih jarang masyarakat wilayah Kecamatan Pakal yang ingin mengurus IKD (Identitas Kependudukan Digital) karena dalam mengurusnya masih harus datang ke Kecamatan Pakal.

b) Di Kecamatan Benowo:

Masih banyak masyarakat yang kurang mempercayai RT Rintisan di wilayahnya, serta terdapat keterbatasan bagi RT Rintisan dalam membantu mengurus administrasi kependudukan karena kurang lihai penguasaan terhadap *smartphone*.

Daftar Pustaka

- Harpy, M., Muchtolifah, M., & Nisa, F. L. (2022). The Klampid New Generation Application as a Support for the Quality of E-Government Based Public Services in the City of Surabaya. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), 189–203. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i2.21731>
- Republik Indonesia, O. (2022). *Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih Ketua Ombudsman RI*.
- Indonesia, P. R. (2019). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354*, 1–13.
- Walikota Surabaya. (2019). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. *Sekretariat Daerah Kota Surabaya, 1965*.